



@SES 209

NASIONALISME KRISIS NASIONAL DAN PARADOKS INDONESIA

Sambutan Ketua
Majelis Luhur Tamansiswa
Pada Hari Wisuda Sarjana dan Magister
Palembang, 13 Oktober 2022

Sri-Edi Swasono

Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa,
Guru Besar Universitas Indonesia,
Guru Besar Luar Biasa UIN-Jakarta,
Dewan Pembina Institut Seni Indonesia Surakarta

**UNIVERSITAS TAMANSISWA
(UNITAS PALEMBANG)
2022**



@SES 209

**NASIONALISME, KRISIS NASIONAL
DAN
PARADOKS INDONESIA**

SAMBUTAN KETUA MAJELIS LUHUR TAMANSISWA
PADA HARI WISUDA SARJANA DAN MAGISTER
Palembang, 13 Oktober 2022

*Assalamualaikum. Wr. Wb.
Salam dan Bahagia,*

*Yang saya hormati,
Bapak Gubernur,
Bapak Wakil Gubernur,
Para Bupati,
Kepala LLDIKTI,
Ketua dan Pengurus Yayasan,
Rektor UNITAS Palembang,
Para Wakil Rektor UNITAS Palembang,
Para Dekan dan para Wakil Dekan UNITAS Palembang,
Para Civitas Akademika UNITAS Palembang,
Para Rektor Perguruan Tinggi di Palembang,
Para Tokoh Masyarakat dan Pejabat Negara
Para Undangan,
Para Orangtua Murid,
Para Wisudawan yang berbahagia,*

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan SELAMAT kepada Rektor dan para Wakil Rektor, para Dekan dan para Wakil Dekan, serta kepada seluruh *civitas akademika* UNITAS Palembang yang telah berhasil mewisuda 285 wisudawan, yang terdiri dari 208 Program Strata 1 dan 77 Program Strata 2, suatu jumlah yang sangat membanggakan.

Kepada semua Perguruan Tinggi Tamansiswa, termasuk UNITAS Palembang, saya ingin mengingatkan mengenai tiga hal yang perlu diimbau oleh para wisudawan Perguruan Tinggi Tamansiswa, yaitu:

Pertama, tentang apa yang digariskan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai kebijakan dasar Pendidikan Nasional Indonesia, yang disampaikan Ki Hadjar pada 31 Agustus 1928 (sebelum Sumpah Pemuda 1928), yang menegaskan:

“...Pengajaran harus bersifat kebangsaan... . Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita. ...”.

Apa artinya penggarisan Ki Hadjar tersebut di atas itu? Artinya para lulusan Perguruan Tinggi Tamansiswa wajib memegang teguh nasionalisme dan patriotisme, serta wajib menyebarluaskan penggarisan Ki Hadjar ini. Dengan kata lain kita diwajibkan untuk mencintai satu Ibu Pertiwi, yaitu Republik Indonesia. Jangan sampai ada di antara kita menjadi apa yang dicemaskan oleh Ki Hadjar, yaitu ada di antara kita yang menjadi terpisah dari bangsa Indonesia dan yang barangkali kemudian akan justru menjadi lawan Bangsa Indonesia. Itulah inti dari arah pendidikan nasional kita, bahwa tidak ada di antara kita yang mengkhianati Bangsa dan Negara Indonesia, melainkan hanya mengabdikan dan *nguri-uri* pada satu Ibu Pertiwi, yaitu Tanah Air Indonesia.

Sebagai sarjana, baik yang S1 maupun S2, semuanya harus mempunyai tanggungjawab intelektual di atas, dan menghayati apa artinya “merdeka” sebagaimana kita telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. “Merdeka” artinya berdaulat, mandiri, memegang teguh *sovereignty* dan *territorial integrity* Indonesia. Merdeka dan berdaulat artinya adalah tidak tergantung pada bangsa lain. Dengan demikian pembangunan nasional yang kita laksanakan ini haruslah untuk “makin memandirikan negara kita”, melepaskan segala ketergantungan, agar tidak mengurangi makna merdeka dan berdaulat itu.

Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam pendidikan nasional kita, banyak kampus di Indonesia yang masih terjebak pada semacam “keterjajahan akademis”, dalam artian banyak pola-pikir Barat dan paradigma Barat telah kita terima begitu saja apa adanya, kita mengadopsi dan bukannya mengadaptasi, yang akibatnya proses Indonesianisasi melenceng dari kebijakan pendidikan nasional seperti yang digariskan oleh Ki Hadjar di atas.

Perlu saya sampaikan pula, bahwa Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa telah diminta oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk *mencermati dan memberikan masukan* terhadap RUU SISDIKNAS. Ini merupakan kesempatan emas bagi Tamansiswa untuk kembali berperan nasional. Permintaan Kementerian ini telah kami laksanakan, kami telah mengirimkan pencermatan dan masukan yang dimaksudkan.

Kedua, saya ingin menyampaikan pembekalan kepada para wisudawan sebagai berikut. Apabila nanti kalian terjun ke masyarakat pasti kalian akan lebih menyadari bahwa kita menghadapi “dua krisis besar”, yaitu “krisis kepemimpinan” dan “krisis konstitusi”.

Tentang krisis kepemimpinan, masyarakat telah merasakan banyak hal yang menyangkut kepentingan Rakyat di berbagai tingkatan, baik vertikal maupun horizontal, pemerintah absen, tidak ada di tempat. Akibatnya banyak terjadi kekacauan, kecemasan, ketidakadilan, ketidakmenentuan, kekecewaan, yang membuat kehidupan masyarakat jauh dari ketentraman dan kedamaian.

Tentang krisis konstitusi, UUD 1945 hasil amandemen akan anda temui dalam kenyataan, sebagai UUD baru, yang tidak lagi boleh disebut sebagai UUD 1945. Sistem asli Indonesia tentang "mono-kameral", di mana kedaulatan rakyat diwakili dalam satu kamar, yaitu dalam DPR ditambah utusan golongan dan utusan daerah membentuk MPR. Sistem "mono-kameral" (sistem satu kamar) ini membuat Ketua DPR adalah pula Ketua MPR, dan Anggota DPR semuanya merangkap menjadi Anggota MPR. MPR yang diposisikan sebagai *die Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*, artinya MPR merupakan penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia, yang menampung kehendak seluruh Rakyat. Dengan sistem "mono-kameral" yang dirubah menjadi "bi-kameral" (sistem kamar yang jamak) sehingga ada DPR yang terpisah dari MPR dan DPD, maka hilanglah makna tidak jelaslah peran perwakilan Rakyat dan suara Rakyat dalam artian sebagai *die Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*. Perwakilan Rakyat dan kedaulatannya menjadi buyar sama sekali. Maka kita melihat kekacauan telah terjadi di lingkungan lembaga-lembaga perwakilan Rakyat. Rakyat boleh merasa tidak terwakili.

Seperti kita ketahui UUD 1945 hasil amandemen, sering disebut sebagai UUD 2002, bahkan tidak jarang yang menyebut sebagai UUD 1945 "palsu". Betapa tidak lebih dari 90 persen jumlah ayatnya merupakan ayat-ayat baru, dan

UUD 1945 asli terdiri dari 1.500 kata, sedang UUD 1945 hasil amandemen terdiri dari 4.500 kata.

Ketiga, tentang paradoks Indonesia dalam era globalisasi yang runyam ini. Apa itu globalisasi? Globalisasi digambarkan sebagai berikut:

“...Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika...” (*H. Kissinger, 1998*).¹⁾ “...Dari segi kultural globalisasi telah cenderung meliputi meluasnya (demi perbaikan ataupun pemburukan) Amerikanisasi...globalisasi adalah penyebaran kapitalisme pasar-bebas nyaris ke setiap negara di dunia...globalisasi merubah semua teman maupun musuh menjadi kompetitor-kompetitor...” (*Thomas Friedman, 2001*)²⁾. “...Dunia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global... saat ini kita memiliki ekonomi global tanpa masyarakat global...” (*G. Soros, 1998*)³⁾. “...Globalisasi adalah imperialisme ekonomi baru...” (*Petras & Veltmeyer, 2001*)⁴⁾. Tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun Amerikanisasi yang sederhana, “...globalisasi telah menciptakan perang dagang...” (*Krugman, 2001*)⁵⁾, bahkan saat ini, “...telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan...” (*Swasono, 2010*).⁶⁾ “...Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana...perlu secara radikal dipikirkan ulang... membuat globalisasi bekerja merupakan langkah-langkah berikutnya untuk memujudkan keadilan global...” (*Stiglitz,*

¹⁾ Trinity College, 1998. Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose..., op.cit.*, hlm. 48.

²⁾ Thomas L. Friedman, *The Lexus and the Olive Tree* (New York: Anchor Books, 2001), hlm. 9-12.

³⁾ George Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998), hlm. 126.

⁴⁾ James Petras and Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century* (New York: Zed Books, 2001), hlm. 11.

⁵⁾ Paul Krugman, “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, di dalam Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkof (eds.), *The Global Agenda: Issues and Perspectives* (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm 321-322.

⁶⁾ Sri-Edi Swasono, “Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi” (Jakarta: BAPPENAS, 4 Agustus 2010) hlm. 5, 14n.

2007)⁷⁾, atau, sebagaimana kita saksikan adalah “...ekonomi terjun bebas *made in Amerika*... tentang pasar-bebas yang terkait dengan tenggelamnya ekonomi dunia...” (Stiglitz, 2010).⁸⁾ Dalam brutalitas pasar-bebas saat ini kebenaran tibanya jaman pertengkaran terbukti: “*Asu gedhé menang kerahé*” – anjing besar memenangkan pertarungan (*primbon Jawa*).

Globalisasi telah mengintensifkan kesemrawutan dari pertentangan-pertentangan paradoksal. Berikut ini akan saya sebutkan adanya sepuluh paradoks Indonesia, yaitu:

Pertama, mengapa negara kita yang kaya raya akan sumber daya alam, subur tanahnya, melimpah kekayaan lautnya, tetapi rakyatnya miskin?

Sebaliknya kita menyaksikan negara-negara yang sama tingkatnya sebagai negara miskin pada tahun 1970-an, telah menjadi negara kaya (Republik Korea), padahal tak sekaya sumber daya alam seperti negeri kita. Kita tidak bertanya mengapa paradoks ini terjadi, sehingga kita pun tidak sampai kepada mencari solusi.

Kedua, pembangunan nasional bertujuan utama antara lain untuk memberantas kemiskinan, tetapi mengapa pembangunan nasional di Indonesia menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Orang-orang miskin berpindah tempat ke lokasi-lokasi lain untuk bertahan hidup, ada yang dengan cara menjarahi tanah-tanah “tak bertuan”, tanah-tanah publik atau pindah ke lokasi-lokasi kumuh yang tidak layak hunian dan tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, mengapa pembangunan berubah menjadi proses dehumanisasi?

⁷⁾ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (London: Allen Lane/Penguin, 2002), hlm. 247-251.

⁸⁾ Joseph E. Stiglitz, *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy* (New York: W.W. Norton, 2010), title page, xii-xxv.

Ketiga, konstitusi kita menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi mengapa "daulat pasar" dibiarkan begitu berkuasa sehingga menggusur "daulat rakyat". Dari berlakunya "daulat pasar" ini terjadilah marginalisasi terhadap rakyat.

Rakyat tidak "terbawaserta" dalam kemajuan pembangunan. Bahkan setiap detik ibaratnya telah terjadi transfer pemilikan (tanah) dari si lemah kepada si kuat. Maka terjadilah kembali proses inlanderisasi, minderisasi dan *inferiorization* (aboriginisasi) terhadap rakyat. Ekonomi rakyat ikut terpuruk dengan terpuruknya rakyat. Lalu akibatnya (seperti dikemukakan pada butir *pertama* di atas), pembangunan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.

Keempat, kita sudah Merdeka, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri, "*to be The Master in our own Homeland, not just to be the Host*", yang hanya menjadi pelayan kepentingan global dan mancanegara? Lalu mengapa kita tetap menjadi *koelie* di negeri sendiri seperti ketika kita masih terjajah? Lagi pula mengapa kita hanya sekadar menjadi "*the master of ceremony*" yang hanya melayani kemauan para tamu asing kita?

Kelima, mengapa kesejahteraan bagi rakyat tidak kunjung tercapai, padahal ada sila ke-5 Pancasila? Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin tajam. Ketidakadilan pendapatan dan pemilikan makin melebar. Globalisasi ekonomi dengan pasar-bebas, persaingan bebas dan perdagangan bebas bawaannya makin mempertajam kesenjangan ini. Di sini rasa keadilan terusik, emansipasi dan toleransi terabaikan. Akibatnya kerukunan nasional akan berubah menjadi konflik nasional, yang akan menggoyahkan kestabilan integrasi dan kohesi nasional.

Keenam, mengapa anak-anak muda kita terbiarkan kehilangan jati-diri dan kebanggaan nasional? Padahal kita sudah Merdeka dan memiliki negeri yang sangat luas, kaya raya akan SDA yang sangat membanggakan? Memang globalisasi dapat mencederai jati-diri, kesadaran lokal dan nasional serta mengaburkan keindonesiaan.

Ketujuh, kesenjangan antara kaya dan miskin telah pula membentuk kesenjangan frustrasi pada pihak si miskin. Kesenjangan antara aspirasi imajiner dan kenyataan faktual yang dihadapi si miskin, yang makin melebar oleh dorongan iklan-iklan konsumtif mewah, serta makin meluasnya nafsu berkehidupan melimpah seperti yang dicontohkan oleh pihak yang kaya. Kesenjangan makin memagut. Mengapa hal ini bisa terjadi di negara yang terikat oleh diktum "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"?

Kedelapan, mengapa yang terjadi sekedar pembangunan *di* Indonesia, bukan pembangunan Indonesia? Anak negeri hanya menjadi penonton proses pembangunan yang terjadi *di* negerinya sendiri. Orang-orang mancanegara yang melakukan pembangunan *di* Indonesia secara bebas. Boleh dibilang tidak ada lagi Daftar Negatif Investasi yang tertutup untuk investor asing, meskipun rakyat dalam-negeri mampu menanganinya sendiri.

Kesembilan, kita memang tidak boleh memelihara *xenophobia*, namun tidak seharusnya kita membiarkan bahwa ekonomi asing mendominasi ekonomi nasional. Mengapa kita begini permisif, apakah karena kita belum mengemban rasa percaya diri sebagai bangsa yang telah Merdeka? Ataupun karena kita lengah-budaya berkemerdekaan, masih tetap servil sebagai Inlander? Dari dimensi makro ekonomi globalisasi haruslah dengan tegar kita hadapi, sambil tetap menyadari bahwa globalisasi bukanlah ajang penyerahan kedaulatan

kepada kekuatan-kekuatan global berdasar paham *the end of nation-state*.

Kesepuluh, kita telah Merdeka dan sepenuhnya berdaulat. Lalu mengapa kita tiba-tiba kendor dalam kewaspadaan nasional dan membiarkan kedaulatan nasional kita terjarah? Mengapa pengutamakan kepentingan nasional tidak lagi kita pegang teguh, padahal hakikat nasionalisme adalah mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global? Bahkan kita yang memperjuangkan *onafhankelijkheid* atau ketaktergantungan bangsa sebagai picu untuk meningkatkan ketahanan nasional, malahan saat ini kita membiarkan diri tidak mandiri dan banyak tergantung kepada kekuatan asing.⁹⁾

Demikianlah sepuluh paradoks Indonesia yang akan kalian temui di dalam kehidupan masyarakat. Dan kalian sebagai sarjana harus bisa berperan aktif ikut meluruskan dan mencari jalan keluar mengatasi pertentangan paradoksal tersebut di atas.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, dengan bekal dedikasi yang tulus dan dengan apa yang telah kalian peroleh selama belajar di Kampus UNITAS Palembang ini.

Tidak lupa, saya menyampaikan penghargaan kepada para orangtua wisudawan, yang telah banyak berkorban demi putra-putri, mereka. Juga barangkali kepada para istri atau suami dari para wisudawan, yang memberikan inspirasi dan dorongan untuk keberhasilan mereka di UNITAS Palembang.

⁹⁾ Butir kesepuluh ini tidak saya kemukakan pada acara 22 September 2018 di atas.

Sekianlah, *Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Salam dan Bahagia. MERDEKA!
Dirgahayu UNITAS Palembang.

Palembang, 13 Oktober 2022

Sri-Edi Swasono
Ketua Umum
Majelis Luhur Tamansiswa